

Manajemen Kampus Merdeka: Sebuah PR Tambahan?

Dwining Putri Elfriede

Faculty Member Universitas Prasetiya Mulya



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan baru untuk perguruan tinggi, yaitu Kampus Merdeka, pada akhir Januari. Melalui kebijakan tersebut, Mendikbud menginginkan universitas di Indonesia diberi ruang yang cukup untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Kebijakan Kampus Merdeka menitikberatkan pada kemudahan membuka program studi baru, pelonggaran proses akreditasi, kemudahan status perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar prodinya. Pemberian otonomi pada prodi baru menuntut universitas untuk mengamati perkembangan zaman agar mampu menawarkan bidang studi yang mampu bertahan di masa depan. Prodi baru terkait dengan *data science*, *new technology*, *renewable engineering*, dan *mathematics model*. Keberadaan prodi-prodi baru itu memberi kebebasan lebih besar kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan tren lapangan pekerjaan di masa depan.

Awal Mula Kebebasan Akademik

Pada abad ke-18 dan 19, profesor di negara-negara Eropa harus tunduk pada otoritas pemerintah dan hanya diizinkan untuk mengajarkan apa yang dapat diterima oleh pemerintah. Beberapa negara menolak praktik ini sehingga mendorong kebijakan kebebasan akademik. Sebagai contoh, Universitas Leiden di Belanda (didirikan pada 1575) memberikan kebebasan dari pengekangan agama dan politik bagi para tenaga pengajar dan siswa.

Universitas Göttingen di Jerman menjadi mercusuar kebebasan akademik pada abad ke-18 dengan berdirinya Universitas Berlin pada 1811. Universitas ini memiliki prinsip-prinsip dasar *Lehrfreiheit* ("kebebasan untuk mengajar") dan *Lernfreiheit* ("kebebasan untuk belajar") sehingga menjadi model yang menginspirasi universitas lain di seluruh Eropa dan Amerika. Salah satu prinsip terpenting yang dianut oleh dunia pendidikan tinggi modern adalah kemerdekaan akademik (*academic freedom*). Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan akademik adalah memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi atau prodi apa pun, sedangkan tenaga pengajar memiliki kebebasan untuk mengajar ilmu yang sesuai dengan kepakarannya.

Kebijakan Kampus Merdeka di Indonesia adalah salah satu kebijakan untuk mendukung Indonesia unggul, menuju Indonesia maju. Program Kampus Merdeka bertujuan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perguruan tinggi sekaligus mengurangi beban administrasi yang acap menjadi permasalahan tersendiri. Program Kampus Merdeka juga memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mempelajari bidang pengetahuan dan belajar di luar lingkungan sempitnya selama ini. Diharapkan, kebebasan ini akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi komunitas perguruan tinggi yang akan berdampak besar kepada pengembangan SDM unggul Indonesia.

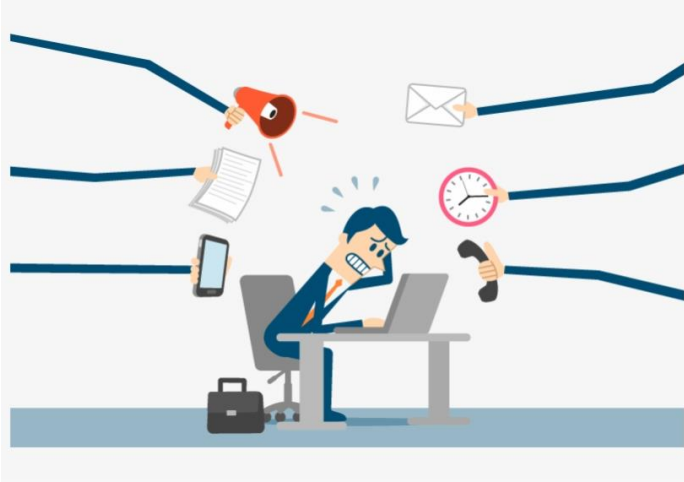
Masalah Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar di Indonesia memiliki tiga tugas pokok, dikenal dengan istilah Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, tetapi praktiknya tidak demikian. Berikut perinciannya: 15 kegiatan terkait pengajaran, 8 kegiatan terkait penelitian, 7 kegiatan terkait pengabdian kepada masyarakat, dan 10 tugas penunjang yang layak mendapat angka kredit (Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Tenaga pengajar dan Angka Kreditnya).

Pada Februari 2018, Paul Gorczynski dari University of Portsmouth mengklaim bahwa tenaga pengajar dan siswa memiliki lebih banyak masalah kesehatan mental daripada sebelumnya. Klaim ini berdasarkan temuan, 43% tenaga pengajar menunjukkan gejala gangguan mental ringan. Ini hampir dua kali lipat prevalensi gangguan mental pada populasi umum. Berdasarkan hasil survei *Times Higher Education* mengenai keseimbangan kehidupan-kerja, tingkat pekerjaan yang berlebihan dapat memberi dampak pada kesehatan mental. Mahasiswa yang diajar oleh tenaga pengajar yang kelelahan dan tertekan juga akan terkena dampaknya saat belajar.

Nottingham Trent University UCU mengeluarkan laporan yang menegaskan bahwa banyak tenaga pengajar yang tak lagi dapat mengendalikan beban kerja mereka. Model beban kerja baru akan ada di bagian daftar pekerjaan yang paling atas. Biasanya, tugas mengajar satu jam kelas akan disertai dengan tambahan 1,6 atau 1,7 jam akademik terkait pada beban kerja tahunan. Kini, tenaga pengajar diwajibkan untuk menyediakan bahan ajar di beberapa platform. Setiap kuliah membutuhkan materi dalam format Powerpoint atau presentasi serupa, *handout* terkait, panduan belajar interaktif, dan video ceramah yang membutuhkan waktu pengeditan dan pengunggahan. Selain itu, tenaga pengajar juga membuat kriteria penilaian yang mencerminkan hasil pembelajaran, menanggapi pertanyaan siswa, serta mengunggah respons dan komentar.

Tenaga pengajar dihadapkan dengan berbagai tingkat pengajaran dan penelitian ilmiah serta tekanan pengembangan pribadi. Penelitian Akinmayowa (2014) menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan stres yang dialami oleh tenaga pengajar di universitas Nigeria. Data dikumpulkan dari 313 tenaga pengajar yang dipilih secara acak dari 1.442 populasi penelitian. Hasilnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres antara tenaga pengajar



sehubungan dengan jenis kelamin, usia, pengalaman mengajar, dan peringkat akademik.

Teknologi mungkin telah mengubah cara kerja akademisi, tetapi belum tentu meringankan beban mereka. Hasil penelitian Safaria (2013) menemukan tujuh kategori stres yang dialami tenaga pengajar, yaitu (1) tidak memadai okupansi peran, (2) meningkatnya tuntutan pekerjaan, (3) peran kurang kesiapsiagaan, (4) dukungan peran tidak mencukupi, (5) ambiguitas peran, (6) peran konflik, dan (7) konflik kerja-keluarga. Alasan yang

menyebabkan responden masih terus bekerja sebagai tenaga pengajar adalah: karena pilihan hidupnya, mengajar adalah pekerjaan yang mulia, dapat berbagi pengetahuan dengan orang lain/siswa, mencintai profesi sebagai tenaga pengajar, dan merasa senang untuk mengajar dan berdiskusi dengan siswa.

Solusi Bagi Tenaga Pengajar dan Mendikbud

Salah satu cara untuk mengatasi stres yang dialami oleh tenaga pengajar adalah dengan koping. Koping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan merespons situasi yang mengancam. Upaya individu dapat berupa perubahan cara berpikir (kognitif), perubahan perilaku, atau perubahan lingkungan yang bertujuan untuk menyelesaikan stres yang dihadapi. Strategi koping yang selalu digunakan oleh tenaga pengajar untuk mengatasi stres adalah lima pola strategi koping, yaitu: (1) koping fokus masalah, (2) koping yang berfokus pada emosi, (3) mencari dukungan sosial, (4) menggunakan koping agama, dan (5) membuat makna.

Adanya kebijakan Kampus Merdeka pastinya akan membuat tenaga pengajar mendapatkan satu lagi tambahan pekerjaan yang akan membebani kinerja mereka. Selain cara koping yang dapat dilakukan oleh tenaga pengajar, ada baiknya, Mendikbud Nadiem meninjau ulang beban kerja tenaga pengajar. Seharusnya, tenaga pengajar dapat fokus ke tugas-tugas pokok mereka tanpa terbebani dengan tugas-tugas tambahan. Tujuannya agar impian Kampus Merdeka dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu tenaga pengajar dan mahasiswa.

Referensi

- Akinmayowa JT. 2014. Stress Among Academic Staff in a Nigerian University. *Covenant Journal of Business and Social Sciences (CJBSS)* Vol.65, No. 1, June, 2014
- Gorczynski P. 2018. More academics and students have mental health problems than ever before. Dikutip

dari <https://theconversation.com/more-academics-and-students-have-mental-health-problems-than-ever-before-90339>

Safaria T. 2013. Job Stress Among Academic Staff: A Cross-Cultural Qualitative Study. International Journal of Public Health Science (IJPHS) Vol.2, No.2, June 2013, pp. 43~58